

# WAWANCARA SINGKAT DENGAN JURU BICARA TIM INVESTIGASI KASUS PELEDAKAN BOM BALI BRIGJEN POL Drs. EDWARD ARITONANG, MM

Mengulas kejadian peristiwa peledakan bom bali  
pada tanggal 12 oktober 2002.



Peristiwa ledakan Bom di Bali terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, ledakan itu terjadi pada tiga tempat di Pedis Bar, Sari Club dan simpang empat Renon sekitar jam 23.11, akibat dari ledakan bom di Bali itu menyebabkan terjadi korban meninggal dunia lebih dari 200 orang dalam bentuk jenazah yang utuh bisa di identifikasi 185 orang, sedang dalam bentuk body part atau bagian-bagian tubuh yang berceraai berai akibat ledakan terdiri lebih dari 241 potong, kemudian menghancurkan bangunan maupun kendaraan bermotor dan yang lebih dahsyat lagi akibat peristiwa ledakan bom itu menyebabkan kehidupan perekonomian Industri Pariwisata di Bali hampir dikatakan nyaris lumpuh, setelah peristiwa itu Polri membentuk suatu tim Investigasi yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Made Mangku Pastike ketiga itu beliau bertugas sebagai Kapolda Papua kemudian beberapa staf yang mendampingi beliau antara lain

terdiri dari Tim Reserse, kemudian Tim Intelijen, kemudian Tim Humas Media, Tim Administrasi Logistik Tim Analisa dan Evaluasi dan tim Bantuan dari Sporting Group atau bantuan dari beberapa Fungsi dan dari Negara-negara Sahabat antara lain seperti dari Labora Torium Forensik dari Kedokteran Kesehatan dari Komlek, Identifikasi, NCB Interpol dari Psikologi, dan beberapa dari Kepolisian Negara-negara Sahabat seperti Australia, Amerika, Inggris, Jepang dan lain-lain terutama dibidang Forensik. Setelah tim memulai bekerja langkah-langkah yang dilakukan meliputi tiga bagian besar.

1. Melakukan identifikasi terhadap korban meninggal dunia, itu dilakukan oleh tim divi atau disaster fiktif Indentification yang dipimpin oleh Komisariss besar Polisi Dr. Edi Saparwoko Wakil Direktur Kedokter Kepolisian.

Kemudian mereka bekerja setiap hari untuk meneliti, mengenali mengidentifikasi jenazah-jenazah sampai saat ini dari 185 jenazah utuh itu sudah bisa di identifikasi lebih kurang 181, kemudian dari 241 potong body part (potongan tubuh) itu sudah bisa di identifikasi lebih kurang 6, sehingga sampai saat ini yang sudah teridentifikasi sudah 187 orang, kemudian sisa-sisa atau bagian-bagian tubuh yang lain sampai saat ini masih terus dilakukan identifikasi sampai saat ini, untuk bisa diketahui dari korban siapa atau bagian tubuh korban yang mana.

2. Melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara meliputi :

- Penelitian tentang jenis bahan peledak.
- Letak posisi ledakan.
- Waktu ledakan
- Cara meledakkan
- Alat-alat kendaraan yang digunakan. Hasil pemeriksaan TKP ini dipimpin oleh Kapuslabfor Denpasar Kombes Pol Drs. Budiono telah bisa di identifikasi tentang jenis bahan peledak menggunakan atau ditemukan sisa-sisa atau residu dari RDX, TNT dan CLORAT waktunya diperkirakan 23.11WIT ledakan antara lain digunakan dengan menggunakan HP dengan getaran HP kemudian alat yang digunakan mobil L 300, hasil penyidikan ini dikembangkan oleh tim investigasi.

3. Sebagai tim ke tiga ini bisa melakukan pencarian terhadap pemilik kendaraan kemudian di identifikasi



sebagai pelaku, kemudian setelah pelaku Amrozi ditangkap kasus ini bisa dikembangkan terus sehingga sampai saat ini sudah 15 tersangka yang berhasil ditangkap dalam perkara Bom Bali ini antara lain : Ali Gufron alias muckklas alias Sofyan, Abdul Azis alias Imam Samudra alias Fati alias Fat, Amrozi alias M. Rozi, Hernianto, Junaedi alias Edi alias Amin, Andri Oktafia alias Yudi, Abdul Rauf alias Sam, Andi Hidayat alias Agus, Muri alias Mahmuri, Muhammad Nazib Nawawi alias Nazid, Saiful alias Bambang Setyono alias Suroso, Herlambang bin Zaidun alias Lambang, ahmad Budiwibomo, Abdul Hamid alias Muhammad Musafah, Maskur alias Abdul Kadir.

Setelah ke 15 tersangka ini ditangkap saat ini agenda besar yang sedang dipersiapkan tim investigasi meliputi tiga hal :

- Merampungkan berkas perkara atas 15 tersangka yang sudah ditangkap.
- Mengejar, mencari, menangkap pelaku-pelaku yang belum tertangkap saat ini Tim Investigasi sudah menentukan 11 tersangka yang belum tertangkap yang masuk dalam daftar pencarian orang yaitu terdiri dari : Dulfatin alias Noval alias Joko Pitono, Idris Alias Gembrot alias Joni Hendrawan, Ali Imron alias Alip, Umar Besar alias Wayan alias Suranto alias Abdul Gani, Umar Patek alias Abusek alias Jeki, Julkarnain alias Arif Sunarso alias Daut, DR Ashari Warga Negara Malyasia, Nurdin Muhamad Dok Warga Negara Malayasia, Saat alias Ahmad Roihan, Heri Haefidin, Hutomo Pamungkas alias Mubarak.
- Agenda ke tiga adalah bagaimana mengungkap jaringan Bom Bali ini dengan berbagai peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia.

Apakah kasus bom bali dapat dijadikan indikator ancaman teroris di

Indonesia. Dari kasus bom bali ini bisa kita lihat bahwa teroris di Indonesia itu bukan lagi hanya bayangan tetapi sudah dalam fakta kejadian, karena selain bom Bali mereka juga melakukan beberapa kejadian atau beberapa peristiwa ledakan antara lain di beberapa tempat di Riau, Batam,

Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, Kemudian yang terakhir peristiwa di Makasar. Jadi saya berpendapat bahwa Teroris sudah merupakan suatu hal yang harus di waspadai yang terjadi di Indonesia.

Kalau disebut apakah ini merupakan skenario sebagai teskis dari penyidikan yang dilakukan bahwa apa yang terjadi di Bali ini merupakan suatu rencana yang disiapkan dengan matang, direncanakan didasarkan pada suatu keyakinan yang diperoleh dari beberapa pengalaman mereka, perencanaan mereka para pelaku ini untuk melakukan suatu tindakan balas dendam yang ditujukan kepada Negara Amerika Serikat. Jadi kalau ada yang berpendapat lain melakukan analisis-analisis saya kira itu sah-sah aja tetapi tim Investigasi tetap melakukan suatu penelitian dari lapangan, dari TKP dari apa-apa yang ditemukan.

Tim Investigasi merasa berterima kasih kepada Pemerintah karena di dalam perjalanan tim bekerja Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perpu No. 1 tahun 2002 dan kusus untuk Bali diberlakukan Perpu No. 2 tahun 2002. Perpu ini untuk sementara sudah dianggap cukup memadai dalam rangka menangani kasus-kasus teroris, karena dalam perpu ini beberapa hal ada kemajuan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku selama ini antara lain misalnya : bagaimana dalam hukum acara proses penyidikan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada penyidik, untuk menangani kasus ini cukup besar termasuk diantaranya



adalah kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penangkapan 7 kali 24 Jam dan proses penyidikan penahanan itu dalam waktu 6 bulan dengan 4 bulan untuk penyidik dan 2 bulan untuk penuntut. Jadi banyak hal yang diperoleh kemajuan untuk memperlancar tugas-tugas penyidikan. Dan kami menganggap ini sudah cukup memadai dan dapat mengakomodir penanganan kasus-kasus bom bali.

Mengamati peristiwa bom Bali ini tentunya kita tidak menginginkan ini terulang kembali oleh karena itu pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan, tidak mudah terprovokasi dan Polri bisa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga informasi apapun yang berkembang di masyarakat bisa disampaikan kepada Polri dan dapat dimanfaatkan Polri untuk melakukan langkah-langkah antisipatif sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira hal ini sangat penting dan bagi Polisi sendiri dari penanganan kasus ini dapat menambah suatu pengalaman dan pelajaran bagaimana **Scientific Crime Investigations** dilakukan, diterapkan dan apabila kita betul-betul menekuninya melaksanakan dengan benar kita akan memperoleh hasil dan mampu mengungkap kasus seberapa rumit kasus itu terjadi bisa diungkap asal benar-benar para petugas lapangan ini konsekwen konsisten untuk melakukan melaksanakan **Scientific Crime Investigations**. Kedepan kita tentunya melihat bahwa tantangan tugas Polri akan



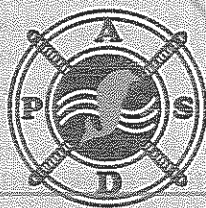
semakin berat, oleh karena itu peran Intelijen untuk bisa memonitor dan bisa memantau perkembangan situasi kemudian memperoleh informasi-informasi awal untuk sesuatu peristiwa kejahatan bisa dikembangkan sehingga jauh-jauh sebelum peristiwa itu terjadi Polisi sudah memperoleh informasi dan dapat melakukan langkah-langkah antisipatif, kemudian juga pelajaran yang bisa dipetik adalah bagaimana Polri bisa mengorganisir kerjasama dengan Kepolisian – Kepolisian Negara sahabat karena bagaimanapun teroris ini adalah merupakan musuh dunia, jadi tidak lagi ancaman terhadap suatu negara tetapi ancaman terhadap seluruh dunia karenanya kerjasama antar negara harus betul-betul bisa dipelihara diwujudkan dalam menangani kasus-kasus teroris.

Untuk mengungkap kasus sebesar peristiwa bom bali ini memang dirasakan beberapa hambatan dilapangan terutama hambatan dibidang peralatan-peralatan forensik peralatan-peralatan investigasi yang diperlukan oleh Intelijen maupun Reserse, kemudian kemampuan Personil-personil dalam mengoperasikan peralatan-peralatan forensik itu untuk melakukan pemeriksaan di TKP, ini mungkin bisa menjadi perhatian Polri ke depan sehingga apabila kita tidak mampu

mengantisipasi terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini lagi ke depan Polri mampu mengungkap tuntas pelakunya berdasarkan kemampuan melakukan identifikasi di dukung oleh peralatan-peralatan yang memadai standar-standar Internasional didalam menangani kasus-kasus teroris. Kemudian Polri juga perlu membangun jaringan komunikasi koordinasi antar lintas institusi ini terutama dengan semua instansi dengan aparat Intelijen terutama, kemudian dengan instansi – instansi penting pemerintah daerah sehingga apabila kita dihadapkan pada suatu peristiwa besar seperti ini tidak ada barer-barer atau hambatan-hambatan yang dihadapi tetapi dengan koordinasi yang baik semua bisa diselesaikan dengan optimal.

Kedepan memang ini saya kira sangat penting untuk dikembangkan baik peralatan komunikasi itu sendiri kemudian membangun sistim dan jaringan komunikasi itu sendiri kemudian tentunya bagaimana mengoperasikan sistem tersebut melatihnya sehingga pada waktu digunakan tidak ada hambatan, saya menganggap bahwa peristiwa bom bali ini dapat dijadikan suatu pelajaran yang sangat berharga baik dari pandangan masyarakat secara luas bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia memelihara persatuan dan kesatuan menjaga

wilayah republik ini karena Bali adalah Indonesia, Indonesia adalah Bali. Jadi siapapun dia warga negara Indonesia harus merasa gangguan yang terjadi di Bali adalah merupakan gangguan bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian bagi petugas tentunya banyak hal yang bisa dipetik dari peristiwa ini bagaimana kita mempert aiki menata kembali sistem Intelijen, sistem deteksi bagaimana kita menata sistem keamanan apakah itu keamanan yang digelar oleh Polri sistem keamanan lingkungan bagaimana koordinasinya, sehingga tidak lagi ada hal-hal yang masuk kewilayah-wilayah tertentu tidak bisa termonitor karena tidak jelas sistem mana yang akan memonitor itu. Kemudian bagi Polri secara khusus peristiwa bom bali ini merupakan pelajaran yang berharga dalam melakukan suatu proses penyidikan. Saya tadi menyebutkan proses penyidikan dengan Scientific crime investigations memang tidak bisa atau mau tidak mau suka tidak suka itu harus menjadi andalan Polri dalam melakukan penyidikan kasus apapun ke depan, karena proses penyidikan secara ilmiah itu bisa dipertanggung jawabkan secara hukum dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya saran bagi setiap anggota Polri ke depan dalam menangani suatu perkara ini, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi diwilayah Republik Indonesia.



## PT. ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (PERSERO)

Jl. Jend Achmad Yani Kav. 52 A Telp. 4208911 (Hanting)  
Fax: 4210544 Kotak Pos 2997 Jakarta 10510  
Homepage : [www.ferry-asdp.co.id](http://www.ferry-asdp.co.id) Email : [ferry@ferry-asdp.co.id](mailto:ferry@ferry-asdp.co.id)

*Direksi, Staf beserta Karyawan*

Mengucapkan :  
**Selamat Hari Raya Idul Fitri 1423 H**  
**Natal & Tahun Baru 2003**



## MEKANISME PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF DAN PEJABAT DAERAH

tugas dan kewenangannya selaku penyidik dan penyidik yang dituangkan dalam surat telegram Kapolri No.Pol. : ST/1008/VIII/2002 tanggal 9

agustus 2002 dengan penjelasan bahwa anggota Polri selaku penyidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya baik penyelidikan atau penyidikan diperintahkan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesucilaan serta menjunjung tinggi hak azasi manusia (pasal 19 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002).

2. Dalam melakukan penyidikan tersebut :

A. Anggota mpr, dpr harus mendapat persetujuan tertulis presiden, persetujuan tertulis mendagri, bagi anggota dprd propinsi, persetujuan tertulis gubernur bagi dprd kabupaten dan kota (pasal 43 UU No. 4 tahun 1999).

B. Dilaksanakan atas dasar persetujuan tertulis kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana (pasal 28 ayat 1 UU No. 22 tahun 1999).

C. Dalam hal anggota dprd tertangkap tangan melakukan tindak pidana, selambat-

lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam dieberitahukan secara tertulis kepada mendagri dan/ atau gubernur (pasal 28 ayat 2 UU No. 22 tahun 1999).

D. Pemeriksaan terhadap kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden (pasal 55 ayat 1 UU No. 22 tahun 1999).

Hal tersebut di atas dikecualikan apabila:

A. Tertangkap tangan melakukan pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.

B. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati (pasal 55 ayat 2 UU No. 22 tahun 1999).

Setelah tindakan penyidikan dilakukan, hal itu harus segera dilaporkan kepada presiden selambat-lambatnya 2 x 24 jam (pasal 55 ayat 3 UU No. 22 tahun 1999).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kepada kasatker/ kasatwil untuk mensosialisasikan kepada personil Polri dalam jajarannya khususnya anggota penyidik dan penyidik.

**T**ugas pokok polri sesuai UU No. 2 tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas tersebut, Polri senantiasa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, penyidik atau penyidik dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri namun tetap memperhatikan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian.

Pada era globalisasi sekarang ini pelaku tindak kejahatan bukan saja dilakukan oleh masyarakat tingkat bawah, melainkan juga dari lapisan atas termasuk anggota mpr, dpr, dprd, kdh (gubernur, bupati, walikota) sehingga perlu diberikan petunjuk penyelidikan dan penyidikan sebagai pedoman anggota Polri dalam melaksanakan



## INSTRUKSI KAPOLRI TENTANG PENYALAH GUNAAN NARKOBA DI LINGKUNGAN POLRI

**P**erkembangan penyalahgunaan narkoba sudah semakin luas dan mempunyai pengaruh serta dampak yang demikian membahayakan bagi kehidupan generasi penerus bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat, anggota Polri, serta keluarganya sudah banyak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, baik sebagai : pemakai, pengedar, distributor, pelindung, pemodal maupun penyalahgunaan barang bukti narkoba. Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegakan hukum seharusnya melakukan tindakan terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba, baik tindakan preventif & preemtif bersama-sama lintas sektoral, maupun tindakan penegakan hukum secara tegas dan tuntas. Sesuai dengan perannya itu, maka anggota Polri dan keluarganya tidak boleh tercemar dengan perbuatan itu, agar Polri dapat bertindak sesuai dengan kewajibannya.

Mengingat pentingnya peran Polri dalam menyukseskan program nasional pemberantasan narkoba, maka Kapolri dengan tegas telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya (sesuai instruksi Kapolri No. Pol. : 02/vi/2002 tanggal 29 Juli 2002) agar anggota Polri & keluarganya bebas dari penyalahgunaan narkotik, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh anggotanya masing-masing serta mengenakan tindakan yang tegas dan keras terhadap anggota baik yang terlibat sebagai pelaku pengguna, pengedar, backing, maupun yang menyalahgunakan wewenang dalam menangani masalah narkoba.
2. Melakukan penyelidikan yang lebih intensif terhadap adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tengah-tengah

masyarakat karna kenyataan menunjukkan jumlah yang tertangani jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang sesungguhnya (fenomena gunung es).

3. Melakukan penyelidikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya termasuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap para penyidik kasus narkoba, dengan tidak memberi sedikitpun ruang toleransi dalam proses penyidikan yang sedang berjalan sampai pada penyerahan perkara ke pihak penuntut umum.
4. Secara bertahap melakukan tes urin kepada seluruh anggota Polri dimasing-masing satuan/sub satker.
5. Memberdayakan secara optimal satgas lupen narkoba dalam rangka menggalakkan budaya anti penyalahgunaan narkoba baik dilingkungan mabas Polri maupun kesatuan kewilayahan dan diharapkan dapat berdampak terhadap masyarakat lingkungan dimana anggota Polri bertempat tinggal.
6. Melaksanakan kerjasama yang berkesinambungan dengan para kepala sekolah mulai tingkat sekolah dasar hingga pimpinan perguruan tinggi negeri/swasta dalam rangka upaya preemtif, preventif hingga pengambilan tindakan tegas kepada pelajar/mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba.
7. Menggalakkan pencanangan gerakan anti narkoba dilingkungan masyarakat dengan dukungan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan instansi terkait lainnya guna menciptakan budaya tangkal awal dilingkungan masyarakat.
8. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar unsur criminal justice sistem yang ada, khususnya

dalam rangka pemberian hukuman yang setinggi-tingginya/maksimal (hukuman seumur hidup dan hukuman mati) kepada para pelaku, pengedar maupun distributor penyalahgunaan narkoba termasuk oknum aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang dalam penanganan kasus narkoba.

9. Memerintahkan kepada para pejabat fungsional yang menangani masalah ini serta meneruskan instruksi ini kepada seluruh satuan dalam jajarannya.

Guna melaksanakan instruksi tersebut diharapkan agar para kasatwil/kasatker :

1. Mempelajari dan memahami instruksi Kapolri tersebut dan mensosialisasikan kepada anggota beserta keluarga besar Polri dilingkungannya.
2. Menjabarkan instruksi tersebut kedalam program yang bisa dilaksanakan dan terukur.
3. Berdayakan fungsi penerangan di wilayahnya untuk publikasi kedalam dan keluar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
4. Laksanakan wasdal dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang telah disusun, agar pelaksanaan intruksi tersebut mencapai hasil yang maksimal.

Semoga Polri semakin bersih dari pengaruh narkoba dan dapat melaksanakan perannya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebagai program nasional yang harus disukseskan oleh semua komponen bangsa Indonesia. ■



## KEBIJAKSANAAN KAPOLRI TENTANG PROTOTYPE BANGUNAN- BANGUNAN POLRI

**P**embangunan log swadaya yang beragam sesuai selera kasatwil serta upaya penertiban pengadaan material Polri secara swadaya dan langkah-langkah yang perlu diambil telah diuraikan pada lembar pensat No. Po.: 63/VII/2002/PENSAT tanggal juli 2002. Dengan judul "kebijaksanaan Kapolri tentang pengadaan swadaya".

Pada lembar pensat ini diinformasikan mengenai pedoman pembuatan pospol yang sangat erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum ; dimana Polisi harus selalu berada ditengah-tengah masyarakat (sentra-sentra penduduk) serta sentra kegiatan masyarakat.

Keberadaan pospol sebagai sarana pelayanan pada masyarakat di lingkungan itu menjadi sangat penting ; tetapi kenyataan menunjukkan jumlah pospol masih terbatas dan belum memadai. Guna memenuhi kebutuhan tersebut seyogyanya pospol harus dibangun melalui apbn maupun swadaya para kasatwil dan masyarakat setempat.

Jika akan membangun pospol swadaya, agar mempedomani st Kapolri No. Pol. : ST/961/VII/2002 tanggal 26 juli 2002 tentang bentuk bangunan dan prototype pospol terdapat 4 type pospol. Terdapat 4 type pospol, sebagai berikut :

1. Pospol satu lantai type 46.
2. Pospol dua lantai type 90.

3. Pospol dua lantai type 148.
4. Pospol dua lantai b type 148.

D a l a m membangun pospol swadaya sebaiknya menggunakan type pospol dua lantai type 90, karena dapat menghemat lahan ; s e d a n g k a n bangunannya cukup luas/representatif untuk menunjang tugas anggota dalam melindungi/melayani masyarakat.

Berkaitan dengan petunjuk type pospol yang dibangun swadaya, kepada para kasatwil perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Agar mencari referensi prototype tersebut beserta spesifikasi teknisnya kepada fungsi yang berwenang (delog).
2. Mensosialisasikan ke tingkat Polsek tentang type pospol tersebut, gunaantisipasi kemungkinan masyarakat akan membangun pospol secara swadaya, sehingga pospol yang dibangun sesuai dengan type dan spektkek yang telah ditentukan.
3. Manakala masyarakat bersedia membangun pospol diwilayahnya maka lakukan wasdal terhadap

p e m b a n g a n pospol tersebut, agar hasilnya sesuai dengan petunjuk yang ada.

4. Laporkan hasil pembangunan kepada pimpinan sebagai prestasi, dan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengadaan personil maupun peralatannya.

Mengevaluasi dampak keberadaan pospol terhadap kinerja Polri, reaksi/partisipasi masyarakat terhadap Polri, fluktuasi kriminalitas pada lingkungan tersebut.■





## KAPOLRI MELANTIK KAPOLDA BARU

Peran dan tugas Polri selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta selaku penegak hukum sudah jelas di atur dalam UU No. 2 Tahun 2002, namun kenyataannya masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

**H**al tersebut disebabkan karena disamping mentalitas dari sebagian personil kepolisian yang cenderung meangabaikan hakikat dari jati dirinya selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat juga disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas terutama di lapangan. Keterbatasan yang dihadapi antara lain menyangkut jumlah personil yang masih kurang, sistem penugasan yang masih belum mencerminkan prioritas kepada operasional kepolisian. Disadari juga bahwa pemanfaatan yang optimal dari sarana yang dimiliki belum dapat menunjang kebutuhan minimal operasional dikarenakan kuantitas maupun kualitas sarana yang tersedia bagi Polri yang belum tercukupi pada indeks minimal.

Kapolri dalam sambutannya melantik para Kapolda mengatakan bahwa Berbagai sorotan kritis dan tajam atas kinerja Polri, dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang berkembang di tanah air belakangan ini, haruslah diakui dan dijawab dan lebih meningkatkan kinerja profesionalisme Polri. Berbagai

tantangan dan tuntutan yang berkembang kita sadari merupakan fenomena dari dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara termasuk kemungkinan yang termanifestasikan dalam bentuk berbagai peristiwa yang menjadi isu global. Kompleksitas permasalahan tugas Polri pada dasarnya tidak hanya dihadapkan pada berbagai peristiwa kamtibmas atau pelanggaran hukum semata, melainkan juga dengan semakin meluasnya faktor relatif kriminogen dengan berbagai dimensi sebagai hasil dari pengaruh dinamika global dalam kehidupan nasional.

Lebih jauh dikatakan bahwa berbagai tantangan dan tuntutan kedepan tidaklah akan semakin menyusut, melainkan akan terus berkembang. Karenanya harus disadari bahwa berbagai tantangan dan tuntutan itu adalah beban tanggung jawab kita semua. Karena itu hanya dengan kebersamaan kita akan lebih tangguh dan menang dalam mengadapinya. Validasi organisasi yang sedang berproses sekarang ini telah diyakini mengkomodir berbagai piranti organisasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan tantangan tugas kedepan baik dibidang operasional maupun pembinaan yang memberikan dukungan bagi kesiapan opsional Polri secara keseluruhan.

Mengakhiri sambutan Kapolri dalam pelantikan Kapolda baru, Kapolri menyampaikan perintah sebagai berikut:

1. Tampilkan sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam setiap kegiatan pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum, sebagai cerminan jatidiri Polri serta

perwujudan dari perubahan paradigma Polri yang mengabdikan untuk kepentingan masyarakat.

2. Intensifkan kegiatan operasional Kepolisian serta kembangkan partisipasi warga masyarakat dalam membina keamanan dan ketertibannya guna menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum sekaligus guna menumbuhkan rasa aman dan tenteram masyarakat.
3. Lakukan upaya-upaya pembinaan kekuatan secara terencana, khususnya bagi peningkatan profesionalisme dan perilaku pengabdian Polri, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana serta meningkatkan soliditas institusi guna kesiapan pengabdian sesuai panggilan tugas Polri.
4. Berikan dukungan yang optimal kepada pemerintah daerah, guna kelancaran upaya pembangunan wilayah termasuk dalam rangka Pelaksanaan otonomi daerah.
5. Bina kerjasama dan koordinasikan dengan instansi terkait dan unsur-unsur TNI dalam rangka dukungan bagi tindakan polisional untuk memelihara stabilitas keamanan wilayah guna menciptakan kondusifitas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Tegakkan hukum secara konsekwen, prosedural dan etis tanpa membedakan status, guna menjamin terpeliharanya rasa keadilan serta mendorong meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum warga masyarakat. (rsk -nats)



# PERESMIAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

U paya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai aspek akan terkait dengan itu misalnya, sikap superioritas laki-laki, kesadaran kolektif masyarakat, kultur, tingkat pendidikan yang relatif rendah, keengganan untuk melapor, sifat menerima nasib dan lain-lain. Untuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi selama ini, Pusat Pelayanan Terpadu setidaknya akan mengurangi keengganan korban untuk melapor serta menerima pengobatan dan penyembuhan atas kekerasan yang dialaminya. Sosialisasi keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu juga diharapkan dapat menggugah kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan atau anak-anak, yang pada gilirannya akan berupaya mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut.

Bagi aparatur Pemerintah, program pembangunan yang teruang dalam Proenas maupun Repeta setiap tahun menjadi dasar bagi berbagai rangkaian kegiatan, antara lain dengan program Peningkatan Peran Masyarakat dan Kemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang memiliki program pokok antara lain :

1. Mensosialisasikan dan melaksanakan rencana aksi penghapusan kekerasan terhadap perempuan
2. Mengembangkan pusat-pusat krisis bagi perempuan korban tindak kekerasan ditingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten / Kota.

D e n g a n pemrograman kegiatan-kegiatan diatas, yang terkait erat dengan dinamisasi kegiatan dari pusat-pusat Pelayanan Terpadu, kiranya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dapat bertindak sebagai Leader, khususnya guna mengupayakan dukungan sumber-sumber daya anggaran sehingga pusat pelayanan terpadu yang kita bangun dengan niat yang mulia akan dapat terus berkipsrah dan berkembang sesuai dengan harapan kita semua. Demikian pula halnya kepedulian dari berbagai pihak seperti Media massa untuk sosialisasi serta pembentuk opini, maupun peran dari LSM-LSM untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, akan sangat besar artinya dalam mendukung kegiatan dan keberhasilan dari pusat-pusat Pelayanan Terpadu.

Penandatanganan kesepakatan bersama dan Peresemian Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Polri RS. SUKANTO, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2002 diharapkan segera diikuti pula dengan pembentukan pusat-pusat Pelayanan Terpadu di Rumah-Rumah Sakit Pemerintah di Daerah-Daerah termasuk Rumah Sakit Bhayangkara di Polda-Polda, hendaknya akan mamapu memanfaatkan secara optimal guna penanganan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan atau anak-anak. Pembangunan dan Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Terpadu, kita harapkan pula akan menjadi Pendorong bagi kita semua, tidak hanya untuk



kepentingan Kuratif dan Represif Yustisial, melainkan juga kepada Hulu Permasalahan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meminimasi dan mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Hal ini penting untuk kita jadikan perhatian mengingat :

Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak diyakini sangat banyak terjadi dalam masyarakat kita yang bercirikan Masyarakat Patriniak. Masyarakat dimana menempatkan perempuan sebagai obyek. Sikap ketidak tahuan, takut, malu dan berbagai alasan subyektif keperempuan mendorong keyakinan bahwa Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak Jauh lebih besar dari apa yang kita ketahui dan dilaporkan kepada Polisi. Sedangkan penghormatan kita terhadap hak asasi manusia, bahwa perempuan dan anak-anak adalah manusia yang juga harus dihormati hak-hak asasinya, bahwa penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak harus menunggu terciptanya kesetaraan gender yang saat ini sedang diintensifkan pencapaiannya oleh berbagai pihak.

Oleh sebab itu bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga, bukanlah sekedar masalah rumah tangga dengan otoritas penuh dari kepala rumah tangga. Melainkan merupakan kejahatan yang kepada para pelakunya haruslah diproses secara Hukum dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.



Untuk itu upaya penanganan korban kekerasan maupun upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sungguh-sungguh akan memberikan Citra yang positif dari dunia Internasional terhadap Indonesia untuk menjadi Negara yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dengan mematuhi konvensi yang telah diratifikasi tentang penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Arahan Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar pada acara tersebut mengatakan bahwa khusus untuk

jajaran Polri, baik dari fungsi Kedokteran Kesehatan maupun fungsi Reserse, agar segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan menyiapkan sumber-sumber daya Tenaga Medis/ para Medis dan Penyidik Polwan guna pengawakan Pusat Pelayanan Terpadu pada Rumah-Rumah Sakit Bhayangkara Polda, serta Tenaga Penyidik Polwan untuk Rumah-Rumah Sakit Pemerintah di Daerah, berikut Fungsi-Fungsi terkait lainnya dalam menyiapkan sumber-sumber daya manusia, sarana prasarana maupun anggaran. Sehingga Pusat Pelayanan Terpadu ini akan betul-betul

memberikan manfaat bagi perlindungan dan penyembuhan korban kekerasan, dan langkah awal kepada proses Hukum yang dapat menjamin Rasa Keadilan para korban dan masyarakat, disamping juga merupakan pendorong bagi kita untuk terus berupaya mengurangi dan mencegah timbulnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang pada hakikinya memiliki hak asasi, serta memiliki derajat yang sama dengan semua manusia yang lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ■

## PENERIMAAN PASUKAN KONGA XIV-15 MISI OPP PBB DI BOSNIA HERZEGOVINA

**P**engiriman Pasukan Perdamaian di negara konflik merupakan salah satu keputusan pemerintah Indonesia yang sangat tepat dan perlu dukungan. Misi pengiriman Pasukan Perdamaian dinegara konflik menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang selalu atensi terhadap perdamaian dunia abadi. Pasukan perdamaian tersebut tergabung dalam pasukan PBB. Selaku insan Bhayangkara yang senantiasa mengemban tugas kepolisian yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegakan hukum ditengah masyarakat, termasuk tugas-tugas internasional yaitu turut serta sebagai pasukan perdamaian. Hal ini merupakan wujud nyata visi dan komitmen bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian abadi di muka bumi ini.

Pada kesempatan upacara penerimaan pasukan Konga XIV-15

Polri yang telah selesai dalam melaksanakan tugas dari misi PBB di Bosnia Herzegovina, Kapolri menegaskan bahwa Pasukan Polri telah menunjukkan kemampuan terbaik dalam misi UN IPFF yang sekaligus dapat mengharumkan nama bangsa dan negara meskipun saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai krisis multi dimensi dan tidak luput dari sorotan internasional.

Kapolri dalam sambutannya sangat menekankan dan mengharapkan kepada anggota yang baru saja berhasil menunaikan tugas mulia tersebut sebagai berikut :

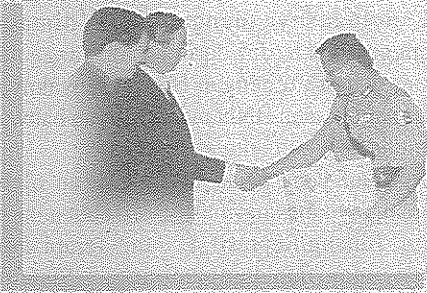
1. Segera selesaikan kewajiban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan tugas-tugas KONGA Polri secara cepat, baik dan cermat.
2. Manfaatkan waktu isitirahat sebagai medium konsolidasi

keluarga, penyegaran kondisi fisik dan mental sebaik mungkin.

3. Manfaatkan pengetahuan, pengalaman empiris dan profesionalisme selama berada di daerah misi untuk diterapkan dan dikembangkan di kesatuan secara bijak dan realistis.
4. Segera menyesuaikan diri, baik dengan perkembangan situasi baik dengan perkembangan situasi dan kondisi di tanah air maupun terhadap kebijaksanaan pimpinan Polri serta ketentuan yang berlaku dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas Polri. (rsk/nats).



## DUBES CINA KUNJUNGI MABES POLRI



Kunjungan Duta Besar Cina untuk Indonesia Mr. Lu Shumin ke Mabes Polri disambut hangat oleh Kapolri Jendral Polisi Drs Da'I Bachtiar, SH beserta beberapa Pati Mabes Polri yang turut mendampingi dalam menerima penghormatan di halaman depan gedung Mabes Polri.

Kunjungan Dubes Cina ke Mabes Polri yang didampingi dua orang staffnya adalah untuk bersilaturahmi kepada kepolisian Republik Indonesia sekaligus untuk tetap menjaga hubungan baik yang selama ini telah berlangsung antara Polri khususnya dengan pemerintah RRC melalui kedutaannya di Indonesia.

Pertemuan diruang tamu Kapolri yang berlangsung lebih kurang satu jam dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk saling tukar menukar informasi dan diakhiri perbincangan Dubes Cina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri beserta staffnya karena telah diterima dengan sangat baik, kemudian dilanjutkan dengan stah terima cinderamata antara kedua belah pihak. (rsk-nats)

## PEMBUKAAN PELATIHAN PETUGAS PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) POLRI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi kedokteran dan kesehatan Polri, salah satu diantaranya tugas dukungan kesehatan dipandang perlu mendapat perhatian pentingnya menangani tindakan terhadap wanita dan anak korban kekerasan (woman and child abuse) sebagai tindak pidana murni dan tindak pidana transnational crime.

Untuk itu didokkes desumdaman Polri bekerjasama dengan asisten menteri pemberdayaan perempuan bidang peran serta masyarakat mengadakan pelatihan petugas pusat pelayanan terpadu (PPT). Pelatihan yang dibuka oleh Dirdokkes Desumdaman Polri, Brigjen Pol. Dr. Bambang Ibnu S. dilaksanakan dari tanggal 17 s/d 20 september 2002 bertempat di Rumkit Polpus R.S Soekanto, Kramatjati Jakarta Timur ini diikuti oleh beberapa peserta dari lingkungan Polri.

Pada sambutannya, dirdokkes desumdaman Polri menyampaikan kebijakan Kapolri tentang perlunya institusi yang dapat berperan sebagai pusat pelayanan terpadu (PPT) yang dapat menangani secara yuridis, klinis dan rehabilitasi secara terpadu dalam satu atap. Setelah melalui proses pendekatan tugas pokok, maka kiranya tepatlah apabila PPT dilaksanakan pada Rumkit-rumkit Bhayangkara seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Dirdokkes mengatakan bahwa Dirdokkes Desumdaman Polri melalui Rumkit Polpus R.S Soekanto sebagai pelaksana teknis, berupaya menjawab tantangan tugas agar PPT diawasi oleh personnel yang professional dan memberikan pelayanan dalam rambu-rambu hak azasi manusia (HAM).■

## SANTUNAN KEPADA ANGGOTA POLRI DAN PNS

Bertempat di Aula Koserse Polri, Rabu kemarin telah berlangsung penyerahan santunan kepada ahli waris Almarhum Brigjen Pol. Drs. Bakat Purwanto ( mantan Direktur Pidana dan Korupsi Korp Reserse Polri ) dari Asuransi Bhakti Bhayangkara yang langsung diserahkan oleh Direktur Utamanya Irjen Pol (Purn) Drs. Gandhi disaksikan oleh yang mewakili Kakorserse Brigjen Pol. Drs, Arifin Rahim berupa tabanas sebesar Rp. 7,5 juta.

Santunan ini juga diberikan kepada anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yang masih aktif dalam melaksanakan tugasnya di seluruh wilayah tanah air, seperti korban Aceh, Ambon, Poso dan kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti yang dialami oleh mantan Waka Polda Jatim Brigjen Pol. Drs Hari Setia Budi.

Brigjen Pol. Drs, Arifin Rahim dalam sambutannya atas nama Kakorserse Polri mengatakan, bahwa tugas Reserse Polri mengandung resiko tinggi, oleh karena itu perlu segera pemecahannya untuk dapat diberikan perlindungan jiwanya. Pada kesempatan ini Polri melalui Asuransi Bhakti Bhayangkara telah bekerjasama dalam bentuk Asuransi Kecelakaan diri bagi anggota Polri dan PNS Polri. Sehingga dalam tugasnya sehari-hari seorang anggota Polri apabila resiko tersebut terjadi pada dirinya, keluarga korban dapat perlindungan untuk masa depan putra-putranya yang ditinggalkan.

Dirut Asuransi Bhakti Bhayangkara Irjen Pol (Purn) Gandhi mengatakan, bahwa pemberian bantuan ini jangan dilihat dari besarnya santunan melainkan kepeduliannya untuk meringankan beban yang diderita dalam mengalami musibah.

Hadir dalam kesempatan itu Wakabahumas Polri dan para undangan lainnya.■



## RAKOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Untuk meningkatkan keterpaduan diantara anggota BNN pada pelaksanaan program kerjanya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba perlunya dilakukan penyamaan visi dan misi, agar diantara sesama anggota BNN terjadi saling keterkaitan yang akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu "Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba". Hal itulah yang dikatakan oleh Kalakhar BNN Komjen Pol. Drs. Nurfaizi, MM. Dalam awal laporannya pada acara Rakor BNN yang dilaksanakan pada rabu (9/10).

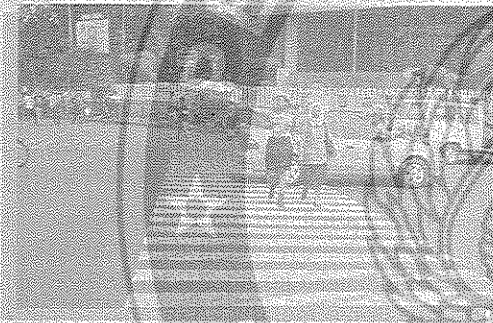
Rakor sehari yang dibuka oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. Da'I Bactiar, S.H. ini dihadiri oleh perwakilan 25 Satgas BNN dari berbagai instansi terkait dan para tamu undangan lainnya di Rupattama Mabes Polri. Dalam sambutannya Kapolri mengingatkan kalangan BNN bahwa tentu hal yang tidak mudah bagi suatu organisasi BNN

dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dimata masyarakat apabila anggotanya terdiri dari berbagai anggota Instansi-instansi terkait, karna itu dengan begitu banyaknya kegiatan yang telah dilakukan oleh BNN menunjukkan bahwa organisasi ini menunjukkan kemajuannya.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BNN sesuai dengan bidangnya masing-masing tersebut antara lain : Bidang Preventif, Bidang Represif, Bidang Terapi dan Rehabilitasi, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Dalam Rangka Peringatan Hari Anti Madat Sedunia pada tanggal 26 Juni 2002 dan Kegiatan Internasional.

Adapun hasil yang ingin dicapai Dalam Rakor berkala ini, diantaranya sebagai berikut : Kesepakatan dari para anggota BNN tentang mekanisme Rakor berkala, adanya keputusan setiap Rakor sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya dll.

## PELAYANAN PRIMA DAMBAAN MASYARAKAT

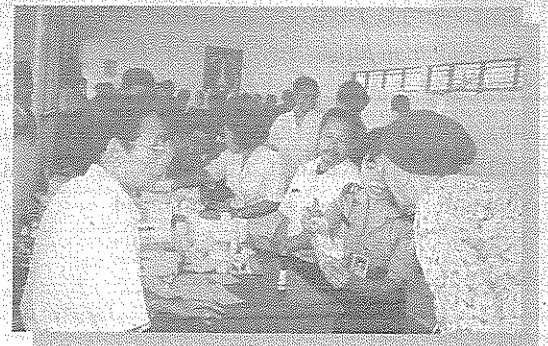


Sejalan dengan pesatnya perkembangan kendaraan bermotor yang menjadi alat transportasi utama masyarakat sekarang ini, ternyata perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai eksekusi dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Salah satu contoh dari eksekusi tersebut adalah terjadinya kemacetan lalu lintas, laka lantak yang mengakibatkan korban jiwa maupun harta benda, bahkan timbulnya kejahatan baru. Berbagai pola dan upaya telah dilakukan dalam mengantisipasi permasalahan yang semakin berat dan kompleks tersebut. Peningkatan personil lalu lintas secara bertahap adalah salah satu upaya yang diharapkan dapat menjawab "tantangan" di atas, dengan mengoptimalkan pelaksanaan baik tugas yang bersifat operasional maupun administrasi dapat dilakukan secara profesional untuk menjamin rasa aman dan tenang masyarakat khususnya pengguna jalan.

Menjawab tantangan di atas Diklat Polda Jabar baru-baru ini telah menyelenggarakan "Pelatihan Peningkatan Kemampuan PJR bagi Bintara". Pelatihan tersebut dilaksanakan di SPN Cisarua Bogor, yang diikuti oleh 40 peserta pelatihan yang mengundang instruktur

dari Kadit Lantas Polda Jabar, Kadit Diklat Polda Jabar dan team instruktur dari Pusdik Lantas Polri.

Kapolda Jabar dalam sambutannya mengatakan bahwa Peningkatan kesadaran hukum masyarakat telah menuntut adanya kualitas pelayanan dari aparat pemerintah termasuk Polri. Oleh karena salah satu tugas pokok Polri adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka cara-cara pelayanan yang dilaksanakan di lapangan perlu ditindaklanjuti dengan latihan-latihan yang sifatnya lebih khusus dari pelaksanaan tugas masing-masing teknis, termasuk yang berkaitan dengan fungsi lalu lintas. Lebih jauh Kapolda menekankan bahwa Fungsi lalu lintas, merupakan salah satu fungsi yang mengandung bobot pelayanan yang sangat tinggi, yang merupakan "etalase" Polri. Tugas-tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh karena itu senantiasa dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya sejalan dengan perkembangan pembangunan di bidang penyediaan sarana dan prasarana transportasi di tengah-tengah masyarakat. (rsk)





## KAPOLRI MENUTUP SESPATI POLRI DIKREG III TP. 2002

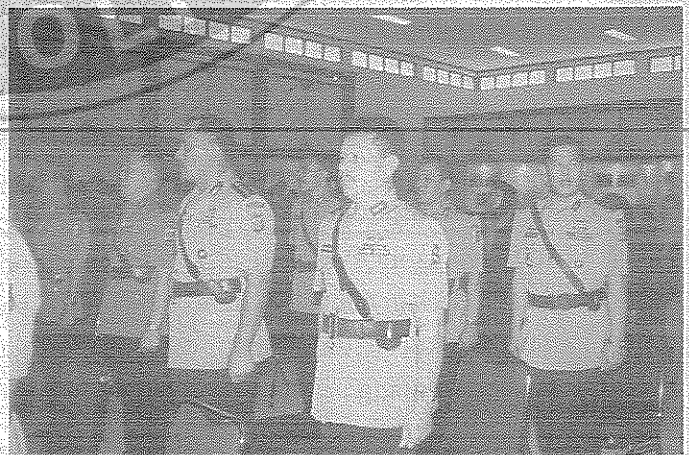
*Konflik-konflik horizontal di beberapa daerah di Indonesia baik yang dilatar belakangi politis maupun kepentingan lainnya seperti sara, masih mewarnai kejadian yang ada seperti di daerah Aceh, Poso, Maluku dan Papua. Demikian Kapolri ketika menutup Sespati Polri Dikreg III TP. 2002.*

Kapolri menegaskan bahwa issue terorisme yang saat ini masih berkembang di kalangan negara tetangga bahwa di Indonesia tempat persembunyian teroris, berkembang menjadi issue nasional dan mengundang reaksi keras bagi kelompok Islam. Adanya kasus peledakan bom di berbagai tempat di Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa dan korban harta bahkan kepercayaan dunia atas keamanan di Indonesia tidak sedikit. Oleh karena itu kita patut berbangga hati atas kerja keras para petugas penyidik dan penyelidik Polri di lapangan terhadap kasus-kasus bom yang terjadi dapat diungkap dalam waktu relatif singkat melalui penyidikan dan penyelidikan yang intensif dan tidak kenal lelah.

Lebih jauh Kapolri menegaskan, bahwa munculnya beberapa kejahatan-kejahatan berdimensi baru dengan menggunakan teknologi tinggi, *white collar crime* dan *organized crime* yang mewarnai kejadian di tahun 2002. Meningkatnya tuntutan masyarakat, transparansi, demokratisasi, perlindungan terhadap HAM, supremasi hukum, lingkungan hidup serta tuntutan terhadap kualitas pelayanan dan profesionalisme aparat, masyarakat mengharapkan Polri untuk lebih maksimal dalam merespon tuntutan tersebut Sementara disisi lain Polri masih dihadapkan pada keterbatasan yang ada baik Sumber Daya Manusia, bidang anggaran maupun peralatan serta fasilitasnya. Kondisi tersebut merupakan satu tantangan yang akan dihadapi di lapangan. Oleh karena itu para anggota Polri harus mau dan mampu m e m b e r i k a n kontribusi positif di dalam membuahk an pemikiran dan langkah-langkah yang kongkrit guna mengakomodir

berbagai hal yang menyangkut tugas-tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mengakhiri amanatnya Kapolri mengharapkan para alumni agar ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta wawasan tentang strategi Kepolisian yang diperoleh dalam pendidikan dapat diterapkan dan dikembangkan di kesatuan dimana bertugas. Jalin hubungan emosional yang positif di lapangan untuk mempererat tali persaudaraan sesama alumni Sespati, alumni dengan Almamater serta tingkatkan koordinasi yang harmonis di lapangan. *(rsk/nats).*





## Pakaian Dinasku

### I. Pendahuluan

#### Umum

a. Minggu siang tanggal 11 Agustus 2002, media elektronik seriv menayangkan acara "indahny kebersamaan" bersama da'i kondang K.H Abdullah Gymnastiar, berdasarkan masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau selama berdakwa, beliau menghimbau kepada kaPolri jenderal polisi Drs. Da'i bachtiar, SH agar memberikan izin kepada anggota Polwan yang ingin menyempurnakan ibadahnya untuk dapat bertugas dengan menggunakan pakaian muslim.

b. Dengan thema "peran polisi wanita dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Polri" penulis ingin memberikan masukan tentang permasalahan penggunaan pakaian dinas bagi anggota Polwan yang beragama Islam yang ingin menggunakan pakaian dinas secara islami yang menutupi aurat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengabdikan kepada negara dan bangsa karena penulis yakin cukup banyak anggota Polwan yang merasa tertekan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang penggunaan pakaian dinas yang menutupi aurat.

c. Sebagaimana dimaklumi bahwa penampilan seseorang dalam berpakaian dapat menunjukkan kepribadiannya dan mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi sipemakai sehingga diharapkan penggunaan pakaian yang menutupi aurat dapat mendorong anggota Polwan untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya karena didasari tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi yang pada akhirnya dapat lebih meningkatkan citra Polwan yang dicintai oleh masyarakatnya.

Sebagai anggota Polwan yang beragama islam yang ingin menyempurnakan pelaksanaan ibadahnya, maka ia harus melaksanakan seluruh perintah agamanya, dalam hal ini tentang penggunaan pakaian seragam dinas yang menutupi aurat, namun disisi lain belum ada aturan tertulis yang memuat tentang ketentuan berpakaian dinas cara muslim dimaksud bagi anggota Polwan yang beragama islam sehingga apabila mereka menggunakan pakaian dengan cara tersebut maka akan dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan pakaian seragam dinas, yang mengakibatkan terjadi pertentangan batin antara dirinya sebagai individu yang beriman dengan dirinya sebagai Polwan yang

melaksanakan tugas, kondisi seperti ini dapat mengganggu semangat dan motivasi kerjanya.

### II. Pembahasan masalah

Dalam kitab suci agama Islam "al-qur'an" Allah berfirman pada surat al-a'raf ayat 26 yang diterjemahkan sebagai berikut : "hai anak adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik, yang demikian adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat". Jelaslah bahwa dalam agama Islam pakaian adalah untuk menutupi aurat dan ini berlaku pada semua pemeluknya termasuk anggota Polwan dan ketaqwaan itu lebih baik dari pakaian, sehingga untuk mencapai tingkat ketaqwaan yang sempurna seyogyanya anggota Polwan muslimah menggunakan pakaian yang menutupi auratnya terlebih dahulu. Penjelasan cara menutupi aurat pada surat al-ahzab ayat 59 adalah "wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum mukminin, hendaknya mereka memanjangkan jilbab mereka keseluruh tubuh. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, dan karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah maha



pengampun lagi penyayang". Maka demikianlah pakaian dinas yang menutupi aurat itu bagi anggota Polwan adalah yang menutupi seluruh badannya kecuali muka dan telapak rangannya, sehingga permasalahannya adalah apakah anggota Polwan yang beragama Islam diizinkan untuk menggunakan pakaian dinas yang menutupi auratnya oleh institusi Polri ?, karena dalam beberapa pengalaman yang terjadi, anggota Polwan yang berpakaian seragam dinas menutupi aurat dinilai telah melanggar aturan. Bila dicermati penggunaan pakaian dinas menutupi aurat sesungguhnya membawa dampak positif bagi Polwan dan Polri pada umumnya karena ketaqwaan anggota Polwan dapat ditingkatkan, sehingga ia dapat lebih menjaga perilakunya dan membawa pengaruh baik untuk lingkungan dan kedinasannya.

Sebagaimana yang tertulis dalam UUD'45 pasal 29 ayat 2, yang isinya antara lain negara menjamin kemerdekaan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam realisasinya anggota Polwan yang beragama Islam belum pernah diberikan kemerdekaan untuk beribadah menurut agamanya, terutama dalam pelaksanaan tata cara penggunaan pakaian dinas yang sesuai dengan ketentuan agama sedangkan institusi Polri merupakan bagian dari negara yang

seharusnya dapat menyikapi kondisi ini dengan arif dan bijaksana.

Tribrata sebagai pedoman kerja Polri pada butir 1 mengisyaratkan bahwa Polri harus berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan YME, artinya bahwa setiap insan Polri dalam hal ini anggota Polwan haruslah orang yang selalu meningkatkan ketaqwaannya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan agamanya dan teraplikasi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Bagaimana mungkin seorang anggota Polwan yang beragama Islam dapat menyempurnakan ketaqwaannya untuk melaksanakan perintah agamanya dalam menjalankan tugasnya dengan berpakaian dinas yang menutupi aurat bila apa yang mereka lakukan dianggap suatu pelanggaran ?

Dalam buku biru "reformasi menuju Polri yang professional", terdapat tiga aspek integral yang memerlukan penyesuaian dan perubahan untuk menuju Polri yang professional yaitu dari aspek struktural (institusi, organisasi, susunan dan kedudukan) aspek instrumental (filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi, iptek) dan aspek cultural (manajemen sumber daya, manajemen operasi dan system pengawasan oleh masyarakat) yang ketiga aspek tersebut diharapkan

dapat menghasilkan perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan kepolisian. Dari sini dapat kita pahami bahwa Polri dalam hal ini anggota Polwan memerlukan suatu perubahan perilaku menjadi lebih baik dan perubahan itu didasari dengan perubahan tingkat keimanan/ketaqwaan dan ketentuannya termasuk perubahan terhadap ketentuan tata cara berpakaian dinas yang menutupi aurat bagi anggota Polwan yang beragama Islam kiranya dapat dikuatkan dengan aturan yang baku, dengan harapan perubahan ketentuan tata cara berpakaian dinas dimaksud dapat meningkatkan ketaqwaan dan merubah kepribadian anggota Polwan menjadi insan yang jujur, bertanggung jawab, rela berkorban demi orang lain, penuh inisiatif, memiliki kestabilan emosi sebagaimana yang dipersyaratkan ada pada diri setiap anggota Polri.

Di Polda Aceh, dengan mengatasnamakan reformasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat Aceh, Kapolda Aceh mengajukan permohonan kepada kaPolri agar anggota Polwan Polda Aceh diizinkan untuk menggunakan pakaian dinas yang menutupi aurat dan sampai saat ini pakaian tersebut masih digunakan oleh seluruh anggota Polwan di Polda Aceh, akan tetapi hal itu tidak menyatu ke Polda lain, sesungguhnya reformasi dan memperhatikan aspirasi masyarakatnya tidak hanya milik



Polwan di Polda Aceh.

Dilema buah simalakama bagi anggota Polwan muslimah, disatu sisi ia ingin menutupi aurat namun disisi lain dalam tata cara penggunaan pakaian dinas masih menggunakan pakaian yang terlihat auratnya sehingga hal ini dapat mengganggu ketentraman jiwa dan mempengaruhi semangat kerja/pengabdian dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya.

Belum ada aturan tertulis yang memuat tentang ketentuan berpakaian dinas cara muslim bagi anggota Polwan yang beragama Islam sehingga apabila mereka menggunakan pakaian dengan cara tersebut maka akan dinilai merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan pakaian seragam dinas Polwan sedangkan aturan kenegaraan yang lebih tinggi saja memberikan kemerdekaan setiap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, diharapkan institusi Polri dan Pimpinan Polri memberikan kesempatan tersebut dalam hal ini kepada anggota Polwan yang ingin menyempurnakan pelaksanaan ibadahnya kepada Tuhan YME dengan menerbitkan suatu aturan baku tentang hal tersebut.

Contoh negara tetangga malaysia, disana polisi wanita telah menggunakan pakaian dinas cara muslim yang menutupi aurat dalam menjalankan tugasnya

sehari-hari, yang dapat digunakan sebagai bandingan karena penggunaan pakaian dinas yang menutupi aurat tidaklah mengganggu aktifitas dan kreatifitas seorang anggota Polwan, justru ia akan lebih percaya diri dan menjaga perilakunya sebagai insan Polri yang baik.

Apa yang dapat dilakukan demi anggota Polwan yang beragama Islam dan ingin menyempurnakan ibadahnya dengan cara berpakaian menutupi aurat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari walaupun saat ini jumlahnya masih relatif kecil namun kedepan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, masyarakat yang beradaban, yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, selayaknya institusi Polri dan Pimpinan Polri memperhatikan aspirasi ini.

Untuk dapat memberikan kesempatan tersebut, perlu diupayakan langkah-langkah dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap I: penyampaian ide dan permasalahannya kepada Pimpinan Polri.

1) Melalui Subbag Polwan/ Ditwatpers Desumdaman Polri sebagai pembina Polwan disampaikan kepada Pimpinan Polri tentang keinginan anggota Polwan yang beragama Islam untuk dapat menggunakan pakaian dinas yang menutupi auratnya

dan pertimbangannya untuk mendapatkan persetujuan pimpinan.

2) Melalui kegiatan seminar/sarasehan, membahas permasalahan keinginan anggota Polwan yang beragama Islam untuk dapat menggunakan pakaian dinas yang menutupi auratnya dan hasil seminar/sarasehan tersebut diserahkan kepada Pimpinan Polri.

3) Melalui para Kapolda, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana yang dilaksanakan oleh Kapolda Aceh.

b. Tahap II : pengkajian

1) Melalui Subbag Polwan Ditwatpers dan Desumdaman Polri apabila telah mendapatkan persetujuan Pimpinan Polri membentuk kelompok kerja untuk mengkaji dan membahas permasalahan terhadap aspirasi anggota Polwan yang beragama Islam untuk dapat menggunakan pakaian dinas yang menutupi auratnya yang menghasilkan suatu naskah proposal dilengkapi dengan alternatif gambar-gambar disain/model dari seragam tersebut untuk diajukan kepada Pimpinan Polri dan bila diperlukan diadakan peragaan dengan menampilkan berbagai alternatif pakaian seragam dimaksud dihadapan para pejabat teras Polri untuk mendapatkan sumbang saran.

2) Melalui Lembaga Litbang Polri, dengan mengadakan penelitian



terhadap permasalahan keinginan anggota Polwan yang beragama Islam tersebut untuk dapat menggunakan pekaian dinas yang menutupi auratnya dan hasil penelitian tersebut diajukan kepada Pimpinan Polri.

c. Tahap III : penetapan ketentuan.

- 1) Desumdaman Polri selaku pembina personil mengajukan konsep surat keputusan kepada Pimpinan Polri tentang tata cara dan penggunaan pakaian dinas yang menutupi aurat bagi anggota Polwan yang beragama Islam.
- 2) Sosialisasi terhadap tata cara dan penggunaan pakaian dinas yang menutupi aurat bagi anggota Polwan yang beragama

Islam, bila surat keputusan tersebut telah mendapatkan pengesahan pimpinan.

### III. Kesimpulan dan saran

#### Kesimpulan

Bagi anggota Polwan yang beragama Islam perlu meningkatkan dan mengaplikasikan ketaqwaannya terhadap Tuhan YME dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu diterbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang tata cara dan penggunaan pakaian dinas yang menutupi aurat dan mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi guna mendapatkan kepribadian dan kinerja Polwan yang baik sehingga mampu meningkatkan

citranya.

#### Saran

Disarankan kiranya naskah ini dapat direalisasikan pelaksanaannya demi kemajuan serta meningkatkan citra Polwan dan Polri pada umumnya.

### IV. Penutup

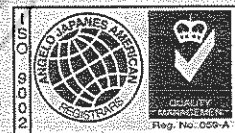
Demikian naskah ini disusun dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Pimpinan Polri dalam menentukan keputusan dan khususnya bagi Kasubbag Polwan dapat memperjuangkan aspirasi anggota Polwan dimaksud.

**D. M. UTAMI**  
Kompil, NRP. 62110715



## PT. "SILLO MARITIME PERDANA"

4 th Floor Prince Centre II Room 401 Jl. Jend. Sudirman kav. 3 - 4 Jakarta 10220  
Ph. : 021 - 5700414, Direct 5736706 - 9 Ext. 1604  
Fax. : (Direct) 021 - 5705270 - 5704544 - 5736165



*Segenap Pimpinan, Staf beserta Karyawan*

*Mengucapkan :*

*Selamat Hari Raya Idul Fitri 1423 H*

*Natal & Tahun Baru 2003*



## SUSUNAN JABATAN, KEPANGKATAN DAN ESELON

Sesuai Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI, organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

Dalam lampiran Kepres No. 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 diatur susunan jabatan, kepangkatan dan Eselon sebagai berikut :

NO.	JABATAN	PANGKAT	ESELON	NO.	JABATAN	PANGKAT	ESELON
<b>A. TINGKAT PUSAT (MABES POLRI) UNSUR PIMPINAN</b>							
1.	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)	Pati Bintang-4	-	Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas)	Pati Bintang-2	IB	
2.	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri)	Pati Bintang-3	IA	Divisi Pembinaan Hukum (Divbinhuk)	Pati Bintang-2	IB	
<b>UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF</b>							
1.	Inspektoral Pengawasan Umum (Irwasmu)	Pati Bintang-3	IA	Divisi (Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Divpropam)	Pati Bintang-2	IA	
2.	Wakil Inspektoral Pengawasan Umum (Wairwasum)	Pati Bintang-2	IA	Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Divtelematika)		IB	
3.	Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Derenbang Kapolri)	Pati Bintang-2	IA	<b>UNSUR PELAKSANA UTAMA</b>			
4.	Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops Kapolri)	Pati Bintang-2	IA	Badan Intelijen Keamanan (Kobintelkam)	Pati Bintang-3	IB	
5.	Deputi Kapolri Bidang Bidang Sumber Daya Manusia De SDM Kapolri	Pati Bintang-2	IB	Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim)	Pati Bintang-3	IB	
6.	Deputi Kapolri Bidang Logistik (Delog Kapolri)	Pati Bintang-2	IB	Wakil Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim)	Pati Bintang-2	IB/IA	
7.	Staf Ahli Kapolri (Sahli Kapolri)	Pati Bintang-2	IB	Badan Pembinaan Keamanan (Kababinkam)	Pati Bintang-2		
<b>UNSUR PELAKSANA PENDIDIKAN DAN STAF KHUSUS</b>							
1.	Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Gubernur PTIK)	Pati Bintang-2	IB	Wakil Badan Pembinaan Keamanan (Wakababinkam)	Pati Bintang-2/1		
2.	Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Kasespimpol)	Pati Bintang-2	IB	Korp Brigade Mobil (Kakorbrimob)			
3.	Gubernur Akademi Kepolisian (Gubakpol)	Pati Bintang-2	IB	<b>B. TINGKAT KEWILAYAHAN (POLDA)</b>			
4.	Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat)			Kapolda			



## MUTASI PEJABAT TINGGI DI LINGKUNGAN POLRI

SKEP KAPOLRI No. Pol.: SKEP/827/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

1. **Komjen Pol. Drs. Kadaryanto**, NRP 48040166 Desumdaman Kapolri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Waka Polri.
2. **Komjen Pol. Drs. Binarto, SH**, NRP 49090232 Delog Kapolri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Irwasum Polri.
3. **Irjen Pol. Drs. Engkesman Rangkeong Hillep**, NRP 48080002 Kakorserse Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Tenaga Ahli Bid.Kam / Koorsahli Kapolri.
4. **Irjen Pol. Drs. Paiman**, NRP 49100193 Pati Mabes Polri (Ang DPR-RI) Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Tenaga Ahli Bid Politik Sahli Kapolri.
5. **Irjen Pol. Drs. Supriadi**, NRP 50060176 Pati Mabes Polri (Ang DPR-RI) Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Tenaga Ahli Bid. Sosek Sahli Kapolri.
6. **Irjen Pol. Drs. James Daniel Sitorus**, NRP 48040002 Wasekjen Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Derembang Kapolri.
7. **Irjen Pol. Drs. Sudirman Ail, SH**, MBA, NRP 48050123 Kapolda Jabar Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Deops Kapolri.
8. **Irjen Pol. Drs. Tjuk Sugiarso** MBA, NRP 52060069 Kasespim Dediklat Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Desumdaman Kapolri.
9. **Irjen Pol. Drs. Djuharnus Wiradinata**, NRP 48100098 Seseolog Kapolri.
10. **Kombes Pol. Drs. Nanan Soekarna**, NRP 55070582 Kapolwil Bogor Pol.da Jabar Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Ses Ncb/ InterPol.
11. **Brigjen Pol. Dr Bambang Ibnu Suparto**, NRP 49040231 Dir Dokkes Desumdaman Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kapus Dokkes Polri.
12. **Brigjen Pol. Dr Imam Hendarto**, NRP 48080252 Karumkit Pol.pus Rs.Sukanto Tk.I Dit Dokkes Desumdaman Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Karumkit Pus Dokkes Polri.
13. **Brigjen Pol. Drs. Darmadji Sw**, NRP 48040172 Kadis Ku Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kapus Ku Polri.
14. **Brigjen Pol. Drs. Basyir Ahmad Barmawi**, NRP 49110178 Kapolda Kalsel Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kadiv Humas Polri.
15. **Brigjen Pol. Drs. Soekamto SH**, MM, MSc, NRP 48090139 Irbin Sumda Itjen Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kadiv Binkum Polri.
16. **Brigjen Pol. Drs. G M Timbul Silaen**, NRP 48080237 Karo Um Setjen Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kadiv Propam Polri.
17. **Irjen Pol. Drs. Saleh Saaf**, NRP 52060065 Kabahumas Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kadiv Telematika Polri.
18. **Irjen Pol. Drs. Demak Lubis**, NRP 48060004 Sese diklat Kapolri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kasespim Polri.
19. **Irjen Pol. Drs. Farouk Muhammad Saieh SH, MBA, Mcja, PhD**, NRP 49100176 Gubernur Ptik Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Gubernur PTIK.
20. **Irjen Pol. Drs. Ismerda Lebang**, NRP 49120328 Kapolda Sulut Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Gubernur AkPol.
21. **Irjen Pol. Drs. Sutanto**, NRP 50090157 Kapolda Jatim Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kalem diklat Polri.
22. **Brigjen Pol. Drs. Zamris Anwar Msc**, NRP 49100178 Pati Mabes Polri (Widyaiswara Madya Bid Sosbud Lemhannas) Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kabaintelkam Polri.
23. **Irjen Pol. Drs. MA Erwin MAP**, NRP 48010146 Kapolda Jateng Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kabareskrim Polri.
24. **Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika**, NRP 51060123 Kapolda Papua Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Waka Bareskrim Polri.
25. **Irjen Pol. Drs. Adang Daradjatun**, NRP 49050196 Koorsahli Kapolri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kababinkam Polri.
26. **Irjen Pol. Drs. Chairul R Rasyidi SH**, NRP 49010038 Ka Akpol. Dediklat Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Waka Babinkam Polri.
27. **Irjen Pol. Drs. Silvanus Yulian Wenas**, NRP 52020099 Kapolda Kaltim Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kakorbrimob Polri.
28. **Kombes Pol. Drs. Imam Widoyono**, NRP 50010154 Kabag Setum Roum Seijen Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kasetum Polri.
29. **Kombes Pol. Drs. Dede Hidayat Djaya Laksana** MBA, MM, NRP 53100125 Koorspri Kapolri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Koorsprim Kapolri.
30. **Kombes Pol. Drs. Iwan Kamarullah Siregar**, NRP 51100007 Kabag Yanma Roum Setjen Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kadenma Polri.



**SKEP KAPOLRI No. Pol.: SKEP/425/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.**

1. **Kombes Pol Drs. Adang Syamsuratman** NRP.50070224 Jabatan Waka Polda Nangro Aceh Darusalam.
2. **Irjen Pol Drs. I Dewa Ketut Gde Astika** NRP.48040052 Jabatan Kapolda Sumut.
3. **Brigjen Pol Drs. Maman Supratman** MSC NRP.49120350 Jabatan Waka Polda Sumut.
4. **Brigjen Pol Drs. Adang Firman** NRP.50120224 Jabatan Kapolda Sumbang.
5. **Kombes Pol Drs. Pudjianto Hadi** NRP.52110030 Jabatan Waka Polda Sumbang.
6. **Brigjen Pol Drs. Deddy Sutardi Komarudin** NRP.49090231 Jabatan Kapolda Riau.
7. **Kombes Pol Drs. Fachruddin Bakar** NRP.48080001 Jabatan Waka Polda Riau.
8. **Brigjen Pol Drs. Mudjianto** NRP.48070194 Jabatan Kapolda Jambi.
9. **Kombes Pol Drs. Carel Risakotta** NRP.50110148 Jabatan Waka Polda Jambi.
10. **Irjen Pol Drs. Didi Kusumayadi** NRP.48080003 Jabatan Kapolda Sumsel.
11. **Brigjen Pol Drs. Yuswar Arsyad** NRP.51050131 Jabatan Waka Polda Sumsel.
12. **Kombes Pol Drs. Andrian Daniel SH** NRP.48010132 Jabatan Kapolda Bengkulu.
13. **Brigjen Pol Drs. Sugiri SH MSC** NRP.49080329 Jabatan Kapolda Lampung.
14. **Kombes Pol Drs. Yusuf Supriyadi** NRP.50090150 Jabatan Waka Polda Lampung.
15. **Irjen Pol Drs. R. Makbul Padmanegara** NRP.51120126 Jabatan Kapolda Metro Jaya.
16. **Brigjen Pol Drs. Edy Sunarno** NRP.52110029 Jabatan Waka Polda Metro Jaya.
17. **Brigjen Pol Drs. Dadang Garnida** NRP.49030148 Jabatan Kapolda Jabar.
18. **Brigjen Pol Drs. Darmadji SW** NRP.48040172 Jabatan Waka Polda Jabar.
19. **Irjen Pol Drs. H Didi Widayadi** MBA NRP.49070261 Jabatan Kapolda Jateng.
20. **Brigjen Pol Drs. Yohannes Wahyu Saronto** MA MSI NRP.48060115 Jabatan Pati Mabes Polri (Diarahkan sebagai Deputi IV BIN).
21. **Brigjen Pol Drs. Djosua PM Sitompul** SH MH NRP.50030164 Jabatan Waka Polda Jateng.
22. **Brigjen Pol Drs. Moch Saudi MSC** NRP.49080312 Jabatan Kapolda DI Yogyakarta.
23. **Kombes Pol Drs. Sudirman** NRP.50080273 Jabatan Waka Polda DI Yogyakarta.
24. **Brigjen Pol Drs. Heru Susanto** NRP.50020146 Jabatan Kapolda Jatim.
25. **Brigjen Pol Drs. Sunarko Danu Ardanto** NRP.53050111 Jabatan Waka Polda Jatim.
26. **Brigjen Pol Drs. Budi Setyawan MSC** NRP.49090244 Jabatan Kapolda Bali.
27. **Kombes Pol Drs. Herman Hidayat SH** NRP.49040185 Jabatan Waka Polda Bali.
28. **Kombes Pol Drs. Iwan Panji Winata** NRP.49020111 Jabatan Kapolda Kalbar.
29. **Kombes Pol Drs. Ida Bagus Ngurah Adnyana** NRP.50120240 Jabatan Waka Polda Kalbar.
30. **Brigjen Pol Drs. Sumantyan Hadidojo Soedarjo** SH NRP.50110123 Jabatan Kapolda Kalsel.
31. **Kombes Pol Drs. Tjiptono Hadibroto** NRP.49010123 Jabatan Waka Polda Kalsel.
32. **Brigjen Pol Drs. Ramli Darwis** NRP.50080293 Jabatan Kapolda Kalteng.
33. **Kombes Pol Drs. Ardjunan Wailan** NRP.51020124 Jabatan Waka Polda Kalteng.
34. **Brigjen Pol Drs. E Winarto H SH** MSI NRP.52020110 Jabatan Kapolda Kaltim.
35. **Kombes Pol Drs. M Tosin** NRP.50100137 Jabatan Waka Polda Kaltim.
36. **Kombes Pol Drs. Andi Hasanudin Mappalinge** NRP.50050165 Jabatan Waka Polda Sulsel.
37. **Kombes Pol Drs. Taufik Ridha MM** NRP.50110127 Jabatan Kapolda Sulteng.
38. **Kombes Pol Drs. Sukirno** NRP.51050140 Jabatan Waka Polda Sulteng.
39. **Brigjen Pol Drs. John Lalo MSC** NRP.49050204 Jabatan Kapolda Sulut.
40. **Kombes Pol Drs. H Mardjito SH MH** NRP.51010149 Jabatan Waka Polda Sulut.
41. **Brigjen Pol Drs. Bambang Sutrisno SH** NRP.51010144 Jabatan Kapolda Maluku.
42. **Kombes Pol Drs. Antonius Bambang Suedi** NRP.52050081 Jabatan Waka Polda Maluku.
43. **Brigjen Pol Drs. Sutomo Tjokro Atmodjo** NRP.48090130 Jabatan Kapolda NTB.
44. **Kombes Pol Drs. Zarwan Djamaan** NRP.52080087 Jabatan Waka Polda NTB.
45. **Brigjen Pol Drs. Yakhobus Jacki Uly** NRP.52120072 Jabatan Kapolda NTT.
46. **Kombes Pol Drs. Arthur Damanik** NRP.48060117 Jabatan Waka Polda NTT.
47. **Irjen Pol Drs. Budi Utomo** NRP.52090071 Jabatan Kapolda Papua.
48. **Brigjen Pol Raziman Tarigan SH** NRP.50050188 Jabatan Waka Polda Papua.
49. **Brigjen Pol Drs. Indarto SH** NRP.50090154 Jabatan Karo Analisis Bareskrim Polri.
50. **Brigjen Pol. Drs. T Asikin Husein** NRP.51070143 Jabatan Kapolda Sultra.
51. **Kombes Pol Drs. Edhi Susilo Hadisutanto** SH NRP.51090080 Jabatan Waka Polda Sultra.

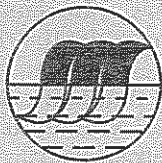


**SKEP KAPOLRI No. Pol.: SKEP/426/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.**

1. Brigjen Pol Drs. Yusuf Muharam NRP.48010025 Jabatan Irwil I Itwasum Polri.
2. Brigjen Pol Drs. Dachroen Rivai Siregar NRP.48010134 Jabatan Irwil II Itwasum Polri.
3. Brigjen Pol Drs. Embong Mardiono NRP.48080231 Jabatan Irwil III Itwasum Polri
4. Brigjen Pol Drs. Djoko Sardono NRP.52080086 Jabatan Irwil IV Itwasum Polri.
5. Brigjen Pol Drs. Sri Soegiarto NRP.52070063 Jabatan Karo Jakstra Derembang Polri.
6. Brigjen Pol Drs. Sudjalma Trisna NRP.50060174 Jabatan Karo Progar Derembang Polri.
7. Brigjen Pol Drs. Syafriadi NRP.52030100 Jabatan Karo Ortala Derembang Polri.
8. Brigjen Pol Drs. Muhibbin NRP.49080331 Jabatan Karo Litbang Derembang Polri.
9. Kombes Pol Drs. R Eddy Karnadi NRP.48080244 Jabatan Karo Jianstra Deops Polri.
10. Brigjen Pol Drs. Rubani Pranoto NRP.51050134 Jabatan Karo Binminops Deops Polri.
11. Kombes Pol Drs. Adityawarman SH NRP.52040100 Jabatan Karo Binpolsus/PPNS Deops Polri.
12. Brigjen Pol H. Darwan Siregar Msc NRP. 49010115 Jabatan Karo Bimmas Deops Polri
13. Brigjen Pol Drs. Dwi Purwanto NRP.51020120 Jabatan Karo Jianstra Desumdaman Polri.
14. Brigjen Pol Drs. Djumain Arief MM NRP.48110099 Jabatan Karo Delpers Desumdaman Polri.
15. Brigjen Pol Drs. Muchfied Sunarya Djaya Atmadja NRP.48030151 Jabatan Karo Binsajah Desumdaman Polri
16. Brigjen Pol Drs. Rahadi Sudarsono NRP.51030153 Jabatan Karo PSI Desumdaman Polri.
17. Kombes Pol Drs. Nasrul Yunus NRP.50080276 Jabatan Karo Jianstra Delog Polri.
18. Kombes Pol Drs. Pepe Tjahyana MBA MM NRP.48070197 Jabatan Karo Bekum Delog Polri.
19. Kombes Pol Drs. I Nengah Nadha NRP.48110109 Jabatan Karo Pal Delog Polri.
20. Brigjen Pol Jusuf Sudradjat NRP. 48020124 Jabatan Karo Faskon Delog Polri.
21. Brigjen Pol Drs. Edward Aritonang MM NRP.53090129 Jabatan Waka Div Humas Polri.
22. Brigjen Pol Drs. Hari Soenanto SH NRP.49110184 Jabatan Waka Div Binkum Polri.
23. Kombes Pol Drs. Sugiyono NRP.51030131 Jabatan Kapus Binprof. Div Propam Polri.
24. Kombes Pol Drs. Aam Amidjaja NRP.48110091 Jabatan Kapus Paminat Div Propam Polri.
25. Brigjen Pol Drs. Herman Suryadi Sumawredja NRP.51050152 Kapus Provost Div Propam Polri.
26. MSI Brigjen Pol Dr. Teguh Soedarsono SIK SH NRP.50060204 Jabatan Kapiknas Div Telematika Polri.
27. Brigjen Pol Drs. Moch Suwondo NRP.50070227 Jabatan Kapus Infolakta Div Telematika Polri.
28. Brigjen Pol Drs. Riswahyono NRP.49120357 Jabatan Kapustelkom Div Telematika Polri.
29. Brigjen Pol Drs. Wahyono NRP.53040059 Jabatan Dir Akademik PTIK.
30. Kombes Pol Drs. Wawan Hendrawan NRP.51120121 Jabatan Dirminwa PTIK.
31. Brigjen Pol Drs. Suprihadi Sahadi NRP.48120197 Jabatan Dir Akademik Sespim Polri.
32. Kombes Pol Drs. Andi Masmiat NRP.51080169 Jabatan Dir Jianbang Sespim Polri.
33. Brigjen Pol Drs. Nank Kusnabuchori SH NSI NRP.47110005 Jabatan Widyaiswara Madya Sespim Polri.
34. Kombes Pol Drs. Baroeto Badrus NRP.49060220 Jabatan Widyaiswara Madya Sespim.
35. Brigjen Pol Drs. Fransiscus Roma Andi Lolo NRP.52110067 Jabatan Widyaiswara Madya Sespim Polri.
36. Kombes Pol M Rifaid Sahidu SH NRP.51060117 Jabatan Widyaiswara Madya Sespim Polri.
37. Brigjen Pol Drs. Fx Bagus Ekodanto NRP.51100009 Jabatan Dir Akademik AKPOL.
38. Kombes Pol Drs. Nono Suprijono NRP.50080292 Jabatan Dir Binlat AKPOL.
39. Kombes Pol Drs. Suprpto NRP.51120133 Jabatan Dir Bindik Lemdiklat Polri.
40. Brigjen Pol Drs. Bambang Pranoto SH NRP.50080280 Jabatan Dir Binlat Lemdiklat Polri.
41. Brigjen Pol Drs. Edison Siregar SH NRP.51000087 Jabatan Kaselapa Lemdiklat Polri.
42. Brigjen Pol Drs. Zainal Abidin Ishak NRP.52110031 Jabatan Kasecapa Lemdiklat Polri.
43. Brigjen Pol Drs. Soekorahardjo Sri Kresno Tjokro Bawono NRP.51030129 Jabatan Waka Baintelkam Polri.
44. Kombes Pol Drs. Idris SH NRP.49120331 Jabatan Karo Renmin Baintelkam Polri.
45. Kombes Pol Drs. Paulus Purwoko MDA NRP.5401069 Jabatan Karo Analisis Baintelkam Polri.
46. Brigjen Pol Drs. Iman Haryatna NRP.52100064 Jabatan Dir A Baintelkam Polri.
47. Brigjen Pol Drs. Lorensius Bambang Sufiarso NRP.51080188 Jabatan Dir B Baintelkam Polri.
48. Kombes Pol Drs. Bambang Aris Sampoerno Djati SH NRP.49120348 Jabatan Dir C Baintelkam Polri.
49. Brigjen Pol Drs. Sudibyo MSC NRP.49080334 Jabatan Dir D Baintelkam Polri.
50. Brigjen Pol Drs. Suharto NRP.49120381 Jabatan Karo Renmin Bareskrim Polri.
51. Brigjen Pol Drs. R Harry Setyabudi NRP.51020112 Jabatan Kapus Ident Bareskrim Polri.
52. Kombes Pol Drs. Dudon Satiaputra NRP.48100103 Jabatan Kapus Labfor Bareskrim Polri.



53. Brigjen Pol Drs. Ariyanto Sutadi MSC NRP.51100111 Jabatan Dir I/ Kam & Trannas Bareskrim Polri.
54. Brigjen Pol Drs. Suyitno Landung Soedjono SH MSI NRP.49110163 Jabatan Dir II/Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri.
55. Brigjen Pol Drs. Edi Darnadi NRP.51050138 Jabatan Dir IV/ Tipiter Bareskrim Polri.
56. Kombes Pol Drs. Djoko Satryo NRP.51080181 Jabatan Dir V/ Narkoba dan OC Bareskrim Polri.
57. Brigjen Pol Nurudin Usman SMIK NRP.51070145 Jabatan Karo Renmin Babinkam Polri.
58. Brigjen Pol Drs. Bambang Susetyo NRP.47120003 Jabatan Dir Samapta Babinkam Polri.
59. Brigjen Pol Drs. Aryanto Boedihardjo SH NRP.52120081 Jabatan Dir Lantas Babinkam Polri.
60. Brigjen Pol Drs. Fransiscus Xaverius Sunarno NRP.51080165 Jabatan Dir Polair Babinkam Polri.
61. Kombes Pol Drs. Darsono NRP.48040162 Jabatan Dir Poludara Babinkam Polri.
62. Brigjen Pol Drs. Johny Wainal Usman NRP.54100281 Jabatan Waka Korbrimob Polri.
63. Brigjen Pol Drs. Paimin Aboe Amar NRP.49070262 Jabatan Ketua Umum Inkoppol.
64. Irjen Pol Drs. Togar Manatar Sianipar MSI NRP.48030154 Jabatan Pati Mabes Polri (Diarahkan sebagai Kalakhar BNN).
65. Irjen Pol Drs. Ansyad Mbai NRP.48060130 Jabatan Pati Mabes Polri (Diarahkan sebagai Waka Lakhar BNN).
66. Kombes Pol Drs. Gregorius Mere NRP.54110227 Jabatan Kapus Represif BNN.
67. Brigjen Pol Drs. Tri Mada Dani MM NRP.48010024 Jabatan Widyaiswara Utama Dediklat Polri.
68. Irjen Pol Drs. Sistiyanto NRP.49050195 Jabatan Widyaiswara Utama Sespim Polri.
69. Brigjen Pol Drs. Mochammad Ariin Rachim SH NRP.49090222 Jabatan Widyaiswara Utama Sespim Polri.
70. Irjen Pol Drs. Dasrul Lamsuddin NRP.47110007 Jabatan Pati Mabes Polri (Dalam rangka penugasan ke Memperindag).
71. Brigjen Pol Drs. Jonny Yodjana NRP.49090247 Jabatan Pati Mabes Polri (Diarahkan sebagai Widyaiswara Utama Lemhannas).
72. Kombes Pol Drs. Sadji Aldjairi NRP.48040163 Jabatan Dir PPITK PTIK.
73. Kombes Pol Drs. Djafar Siregar MM NRP.48080226 Jabatan Kapus Ku Polri.
74. Kombes Pol Drs. Bambang Abimanyu NRP.53050053 Jabatan Ses Puskus Polri.
75. Irjen Pol Drs. Soaloon Simatupang Sianturi NRP.47100029 Jabatan Pati Mabes Polri (Dalam rangka pensiun).
76. Brijen Pol Supriyadi Wiryatmodjo SH SE MBA NRP.4709001 Jabatan Pati Mabes Polri (Dalam rangka pensiun).
77. Brigjen Pol Drs. Abdul Djalil Madjid NRP.47100002 Jabatan Pati Mabes Polri (Dalam rangka pensiun).



**PT. "SILLO BAHARI NUSANTARA"**

4 th Floor Prince Centre II Room 401 Jl. Jend. Sudirman kav. 3 - 4 Jakarta 10220  
Phone : 021 - 5733621, 5733825 5705281, 5734350  
Fax : 021 - 5738058 - 5734350



*Segenap Pimpinan, Staf beserta Karyawan*

*Mengucapkan*

*Selamat Hari Raya Idul Fitri 1423 H*

*Natal & Tahun Baru 2003*